

Judul : Desakan Makin Kuat
Tanggal : Jumat, 31 Maret 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Desakan Makin Kuat

Desakan agar pemerintah segera menyerahkan surat presiden, naskah akademik, dan draf RUU Perampasan Aset ke DPR makin kuat.

JAKARTA, KOMPAS — Desakan kepada pemerintah untuk serius menyiapkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana kian menguat. Apalagi, pemerintah kerap mengungkapkan urgensi tersebut, tetapi hingga saat ini tak kunjung menyerahkan surat presiden, naskah akademik, dan draf RUU ke DPR. Padahal, RUU tersebut merupakan usul inisiatif pemerintah.

Sejumlah anggota Komisi III DPR dari lintas fraksi mendukung pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana. Dukungan ini mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Mahfud MD, Rabu (29/3/2023) malam. Dalam rapat pembahasan mengenai dugaan adanya transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan tersebut, Mahfud menyebutkan upaya pemberantasan korupsi akan makin efektif jika RUU Perampasan Aset disahkan.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani, dihubungi di Jakarta, Kamis (30/3), mengatakan, RUU Perampasan Aset disepakati pe-

merintah dan DPR sebagai RUU inisiatif pemerintah. Karena itu, hendaknya saat ini pemerintah mulai duduk bersama dengan fraksi-fraksi partai politik di DPR untuk memastikan semua atau mayoritas fraksi menyepakatinya. Namun, hingga saat ini belum ada pendekatan yang dilakukan pihak pemerintah kepada fraksi.

Alternatif lain, kata Arsul, pemerintah bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) jika menilainya mendesak sehingga harus cepat ada aturan terkait.

"Sekarang ini, kan, yang dikesankan adalah DPR tidak mau membahasnya. Padahal, naskah akademik dan draf RUU-nya saja belum dikirim ke DPR," ujarnya.

Arsul meyakini, jika RUU Perampasan Aset disahkan, akan memberikan landasan hukum yang lebih baik dalam penegakan hukum. Namun, dia mengingatkan, pada akhirnya, semua akan bergantung juga pada budaya penegakan hukum karena selama ini penegakan hukum masih tebang pilih.

"Jika proses hukum itu dilimitasi alias masih tebang pilih, jangan berharap terlalu banyak juga meski dibuat UU Perampasan Aset," katanya.

Dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset juga muncul dari anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Johan Budi. Johan Budi menyebut, jika RUU Perampasan Aset bisa efektif menuntaskan persoalan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, dia akan mendukung sepenuhnya.

Johan Budi juga yakin mayoritas fraksi di DPR akan mendukung terwujudnya RUU itu karena setidaknya tujuh partai di DPR merupakan partai koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Lagi pula, telah terbukti sejumlah UU akhirnya berhasil dibentuk, seperti UU Ibu Kota Negara dan UU Cipta Kerja.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hince Panjaitan juga mendukung penuh pembahasan RUU Perampasan Aset jika RUU itu dianggap urgen untuk mengatasi korupsi, termasuk mengungkap dugaan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun yang terkait Kementerian Keuangan. Bahkan, ia setuju jika Presiden menerbitkan Perppu tentang Perampasan Aset.

"Buat saja perppunya kalau memang benar-benar ada kepentingan memaksa. Jangan

DPR juga yang terus disalahkan. Sebab, inisiatifnya itu datang dari pemerintah karena kepentingan memaksa menyelesaikan ratusan triliun untuk bangsa dan negara. Kita sama-sama membongkar ini," ujar Hince.

Sekretariat Negara

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menyebut naskah akademik dan draf RUU Perampasan Aset sudah selesai diharmonisasi di pemerintah. Saat ditanyakan kapan surat presiden RUU Perampasan Aset bakal dikirim ke DPR, Yasonna meminta *Kompas* untuk memastikan hal itu kepada Kementerian Sekretariat Negara (Setneg). "Coba dicek ke Setneg," ujarnya.

Staf Khusus Sensesneg Faldio Maldini saat dihubungi meminta waktu untuk mengeceknya terlebih dahulu. "Mohon beri waktu cek, ya," katanya.

Adapun pemerintah sudah mengajukan RUU Perampasan Aset untuk diproses DPR sejak tahun 2020. Namun, tiba-tiba RUU itu dikeluarkan dari daftar Program Legislasi Nasional ketika akan dimasukkan dalam daftar prioritas.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, berpandangan,

RUU Perampasan Aset merupakan salah satu RUU yang sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kerugian negara secara optimal. Di sisi lain, Lucius melihat, realitas politik di DPR akan sangat memengaruhi kelancaran proses pembahasan RUU Perampasan Aset. Sebab, ia meyakini, proses pembahasannya akan memicu resistensi dari sejumlah elite politik karena muatan RUU ini tidak menguntungkan bagi mereka.

"Karena itu, kini pilihan berada di tangan DPR, apakah akan lebih menjadi penjaga kepentingan masing-masing partai politik ataukah melihat kebutuhan publik terhadap RUU Perampasan Aset," katanya.

Lucius juga menekankan, jika pemerintah serius ingin menyelesaikan RUU ini, surat presiden harus segera dikirim ke DPR. Apalagi, pada 14 April, DPR akan kembali memasuki masa reses. DPR baru akan kembali bersidang pada pertengahan Mei 2023.

"Karena itu, keseriusan dua pihak, pemerintah dan DPR, sangat dinanti di sini, apakah akan lebih jadi penjaga kepentingan masing-masing instansi dan partai politik atau melihat kebutuhan publik terhadap RUU Perampasan Aset," katanya. (BOW/NIA)